

**PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI USAHA TEMPE SKALA
RUMAHAN BAPAK SUARDI**

Mas Amah ^{1*)}
Alila Zahira Kusuma ²
Rahmi Ariyanti ³

^{1,2,3} Universitas IBA Palembang

Correspondence author : masamahhamdan@gmail.com *)

Abstrak

Usaha tempe skala rumahan, sebagai bagian vital dari UMKM, seringkali menghadapi tantangan manajerial, terutama dalam perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP). Studi kasus pada usaha tempe Bapak Suardi di Banyuasin menunjukkan bahwa tanpa perhitungan yang akurat, harga jual ditetapkan sebesar Rp5.000, padahal HPP sebenarnya mencapai Rp7.800 per bungkus, menyebabkan kerugian tersembunyi.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan pendekatan partisipatif, dilakukan pelatihan metode full costing dan pendampingan pencatatan biaya. Intervensi ini berhasil meningkatkan akurasi penetapan harga, yang mendorong pertumbuhan margin keuntungan hingga 20%.

Selain perbaikan teknis, program ini juga sukses meningkatkan literasi keuangan dan keterlibatan anggota keluarga dalam manajemen usaha. Hal ini membuktikan bahwa pemberdayaan UMKM melalui edukasi manajerial tidak hanya memberikan solusi finansial, tetapi juga membangun fondasi ekonomi keluarga yang berkelanjutan dan memperkuat peran UMKM dalam ketahanan pangan lokal.

Kata kunci : Harga Pokok Produksi, UMKM, Tempe, Full Costing, Pengabdian Masyarakat

Pendahuluan

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah lama menjadi penyangga utama perekonomian nasional Indonesia. Peranannya tak hanya terlihat dalam jumlah unit usaha yang tersebar di berbagai pelosok negeri, tetapi juga pada kontribusinya dalam menyerap tenaga kerja dan menopang Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan laporan Kementerian Koperasi dan UKM Republik

Indonesia (2023), terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM di Indonesia yang mampu menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional. Dominasi ini menunjukkan betapa UMKM menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti krisis pangan, inflasi, dan fluktuasi harga komoditas internasional.

Di antara berbagai bentuk UMKM yang berkembang, usaha tempe skala rumahan merupakan salah satu sektor yang memiliki akar budaya dan ekonomi yang kuat. Tempe tidak hanya menjadi makanan khas Indonesia yang digemari oleh berbagai lapisan masyarakat, tetapi juga menjadi sumber protein nabati yang murah dan bergizi. Sebagai produk pangan yang terjangkau dan bernilai gizi tinggi, tempe memiliki peran strategis dalam mewujudkan

ketahanan pangan nasional. Dalam situasi ekonomi yang menekan, masyarakat semakin mengandalkan tempe sebagai alternatif sumber protein, sebagaimana dikemukakan oleh Dewianawati dan Ilmi (2024).

Namun, besarnya potensi usaha tempe rumahan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Banyak pelaku UMKM di sektor ini yang menjalankan usaha secara konvensional tanpa didukung oleh manajemen usaha yang memadai. Salah satu kelemahan mendasar adalah rendahnya pemahaman terhadap manajemen keuangan, terutama dalam hal perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP). Banyak pelaku usaha masih menentukan harga jual berdasarkan intuisi atau meniru harga pasar, tanpa menghitung secara cermat biaya-biaya produksi yang dikeluarkan. Hal ini tentu berisiko terhadap keberlanjutan usaha, terutama jika harga jual tidak menutupi biaya produksi.

Risiko kerugian akibat kesalahan perhitungan HPP bukanlah isapan jempol. Rahmadani dan Febrianti (2022) mencatat bahwa ketidaktepatan dalam perhitungan biaya produksi dapat menyebabkan kerugian hingga 15% dari total produksi UMKM tempe. Ini berarti, alih-alih memperoleh keuntungan, pelaku usaha justru bisa mengalami kerugian yang mengancam kelangsungan usahanya. Ketidaktahuan dalam menyusun HPP juga menyebabkan tidak adanya margin keuntungan yang stabil dan tidak terukurnya efektivitas biaya operasional.

Kondisi ini diperparah oleh naiknya harga bahan baku utama dalam produksi tempe, yaitu kedelai. Dalam dua tahun terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) mencatat kenaikan harga kedelai impor lebih dari 40%. Mengingat sebagian besar pelaku UMKM masih mengandalkan bahan baku impor dan memiliki keterbatasan modal, maka gejolak harga ini memberikan tekanan tambahan. Dalam situasi ini, kemampuan dalam menghitung HPP secara akurat menjadi kebutuhan yang mendesak agar pelaku usaha tetap dapat bertahan dan mengambil keputusan bisnis secara rasional.

Tidak hanya faktor harga bahan baku, pelaku usaha kecil juga harus bersaing dengan industri besar yang memiliki kapasitas produksi lebih efisien dan jangkauan distribusi yang luas. Sementara industri besar telah menerapkan sistem manajemen biaya yang canggih, pelaku UMKM seperti Bapak Suardi di Banyuasin masih mengandalkan praktik turun-temurun tanpa pencatatan keuangan yang sistematis. Usaha tempe yang telah dikelolanya lebih dari satu dekade belum pernah menerapkan sistem akuntansi biaya, termasuk dalam perhitungan HPP secara formal.

Studi oleh Wardiningsih et al. (2024) mengungkapkan bahwa sebagian besar UMKM di sektor pangan belum memiliki sistem pencatatan biaya yang baku. Hal ini sejalan dengan temuan Ekasari et al. (2024) yang menyebutkan bahwa sekitar 70% pelaku usaha makanan rumahan masih belum menerapkan prinsip-prinsip dasar pencatatan biaya produksi. Padahal, pencatatan yang rapi merupakan langkah awal menuju profesionalisasi usaha dan penguatan daya saing.

Lingkungan sosial tempat usaha Bapak Suardi beroperasi juga mencerminkan realitas khas sektor informal tingkat literasi keuangan rendah dan minimnya akses terhadap pelatihan manajemen usaha. Di tengah kondisi seperti ini, intervensi berupa pelatihan perhitungan HPP menjadi penting untuk membekali pelaku usaha dengan kemampuan teknis dalam menghitung biaya produksi secara menyeluruh, termasuk biaya tetap dan biaya variabel, melalui pendekatan full costing.

Pendekatan full costing memungkinkan pelaku usaha mengetahui struktur biaya secara lengkap dan menetapkan harga jual yang mencerminkan kondisi riil. Penelitian oleh Nurtiasni et al. (2025) menunjukkan bahwa UMKM yang menerapkan metode full costing dalam menghitung HPP memiliki tingkat ketepatan harga jual yang lebih tinggi hingga 25%. Ketepatan ini tentu berdampak positif pada kestabilan keuntungan dan efisiensi pengelolaan modal kerja.

Lebih dari itu, pemahaman terhadap struktur biaya dapat membuka peluang efisiensi dalam proses produksi. Wahyuni et al. (2022) mencatat bahwa pelatihan penghitungan HPP mampu meningkatkan efisiensi biaya operasional hingga 12% di sektor makanan ringan. Ini berarti pelaku usaha tidak hanya mampu menghitung dengan tepat, tetapi juga dapat mengambil langkah strategis untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas.

Penguatan literasi biaya produksi juga berdampak pada aspek sosial dan kelembagaan. Ketika pelaku usaha memiliki data biaya yang terdokumentasi, mereka dapat menggunakannya sebagai dasar untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, mengikuti program pemerintah, atau menjalin kerja sama bisnis. Oleh karena itu, pelatihan HPP tidak hanya penting dari sisi teknis, tetapi juga dalam mendorong transformasi sosial dan pemberdayaan komunitas UMKM.

Kegiatan pelatihan ini juga sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Secara khusus, kegiatan ini mendukung tujuan ke-8 yaitu “Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi,” serta tujuan ke-12 yaitu “Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.” Pengelolaan usaha yang efisien, berbasis data, dan berkelanjutan akan memperkuat ketahanan ekonomi lokal (Sitepu et al., 2023).

Selain itu, perhitungan HPP secara sistematis juga berfungsi sebagai alat kontrol produksi yang efektif. Dengan mengetahui komponen biaya secara rinci, pelaku usaha dapat mengelola bahan baku, limbah, dan waktu produksi secara lebih efisien. Penelitian oleh Santoso dan Wulandari (2023) menunjukkan bahwa UMKM yang menghitung HPP dengan pendekatan full costing memiliki pengelolaan bahan baku dan limbah yang lebih baik, sehingga mendukung keberlanjutan usaha secara menyeluruh.

Melalui pendekatan ini, pelaku UMKM tidak hanya diajak untuk berpikir efisien, tetapi juga diarahkan untuk mengelola usaha dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data. Ketika pelaku usaha memahami nilai dari data biaya produksi, maka praktik manajemen yang semula bersifat informal dapat bertransformasi menuju sistem yang lebih profesional.

Dengan berbagai kondisi tersebut, maka kajian mengenai “Perhitungan Harga Pokok Produksi Usaha Tempe Skala Rumahan Bapak Suardi” menjadi sangat relevan. Topik ini tidak hanya menyentuh sisi teknis dalam penghitungan biaya, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika ekonomi lokal, struktur sosial masyarakat, dan kebijakan pembangunan. Diharapkan kajian ini dapat menjadi model intervensi yang dapat direplikasi di berbagai wilayah sebagai bentuk penguatan kapasitas UMKM berbasis literasi biaya produksi.

Metode Pelaksanaan Kegiatan

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami praktik perhitungan harga pokok produksi (HPP) secara mendalam dan kontekstual dalam usaha tempe skala rumahan milik Bapak Suardi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna sosial serta perilaku ekonomi pelaku usaha dalam konteks nyata tanpa manipulasi variabel, sebagaimana ditegaskan oleh Widyastuti et al. (2023). Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal, mengingat subjek utama dari penelitian ini hanya satu unit usaha tempe yang diteliti secara intensif. Studi kasus dinilai relevan karena memberikan fleksibilitas untuk memahami kompleksitas operasional UMKM dan dinamika keputusannya, seperti disampaikan Sitepu et al. (2023). Dalam studi ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama (key instrument) dalam proses pengumpulan dan interpretasi data. Untuk mendukung proses tersebut, digunakan alat bantu berupa panduan wawancara, lembar observasi, serta catatan lapangan yang mengacu pada indikator biaya dalam metode full costing, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya tetap, dan biaya variabel (Nasihin et al., 2024; Dewianawati & Ilmi, 2024). Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulatif, yaitu melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur. Observasi dilakukan selama proses produksi tempe, dimulai dari pencucian kedelai hingga

pengemasan akhir, guna mencatat proses nyata dan menemukan potensi inefisiensi (Sunarwati & Sa'diyah, 2024). Wawancara mendalam dilakukan kepada Bapak Suardi dan anggota keluarganya yang aktif dalam kegiatan produksi tempe.

Wawancara difokuskan pada persepsi mereka terhadap pengelolaan biaya, tantangan usaha, serta pendekatan dalam penetapan harga jual (Ramadhani & Harahap, 2023). Dokumentasi yang dikumpulkan mencakup catatan keuangan informal, foto kegiatan produksi, dan bukti visual lainnya untuk mendukung validitas data (Fauji & Median, 2023). Catatan tersebut memberikan gambaran nyata tentang keadaan usaha sebelum dan sesudah intervensi. Studi literatur digunakan untuk memperkaya analisis data dengan membandingkan temuan lapangan terhadap teori dan hasil penelitian sejenis dalam konteks UMKM pangan di Indonesia. Literatur tersebut juga memberikan dasar konseptual dalam merancang instrumen penelitian.

Penelitian ini juga dilakukan dalam kerangka pengabdian masyarakat berbasis aksi kolaboratif. Sebelum kegiatan dimulai, peneliti memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat Talang Keramat, Banyuasin, dan melakukan wawancara eksploratif terhadap tokoh masyarakat serta pelaku UMKM lain di wilayah tersebut. Bapak Suardi dan keluarganya dipilih sebagai subjek utama karena telah menjalankan usaha tempe selama lebih dari satu dekade, namun belum memiliki sistem pencatatan biaya yang terstruktur (Kumbara et al., 2022). Hal ini menjadikan mereka representatif dalam konteks penelitian. Kegiatan pendampingan dilakukan melalui beberapa tahap intervensi, mulai dari diskusi kelompok terfokus (FGD), pelatihan pencatatan biaya, simulasi penghitungan HPP dengan metode full costing, hingga evaluasi berkala terhadap implementasi hasil pelatihan (Wardiningsih et al., 2024).

Pendekatan partisipatif ini bertujuan agar proses transformasi manajemen usaha tidak hanya menjadi proses eksternal, melainkan menjadi praktik internal yang diadopsi pelaku usaha secara mandiri dan berkelanjutan. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan, untuk memastikan konsistensi dan ketepatan informasi. Teknik ini sebagaimana dijelaskan oleh Triwidatin et al. (2022) dapat memperkuat keandalan hasil penelitian kualitatif. Tahapan kegiatan dibagi menjadi lima fase utama: identifikasi masalah, perencanaan intervensi, pelatihan, evaluasi, dan refleksi bersama. Setiap fase disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan subjek untuk memaksimalkan hasil (Ekasari et al., 2024).

Pada fase identifikasi masalah, ditemukan bahwa Bapak Suardi tidak mengetahui secara pasti besaran biaya tetap dan variabel yang dikeluarkan selama proses produksi, sehingga harga jual produk tempe hanya didasarkan pada intuisi pasar. Pada fase pelatihan, peserta dikenalkan pada struktur biaya berdasarkan pendekatan full costing. Mereka juga diajarkan mencatat setiap pengeluaran dalam tabel sederhana yang disesuaikan dengan kapasitas pemahaman pelaku usaha mikro. Simulasi penghitungan HPP dilakukan dengan menggunakan data aktual yang dikumpulkan selama observasi. Dari simulasi ini ditemukan bahwa HPP per bungkus tempe sebesar Rp 6.500, sedangkan harga jual sebelumnya hanya Rp 5.000.

Hasil simulasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk merevisi harga jual menjadi Rp 7.800 per bungkus, dengan mempertimbangkan margin keuntungan wajar sebesar 20%. Ini menunjukkan bahwa penerapan full costing memberikan akurasi dan transparansi dalam manajemen usaha. Pada fase evaluasi, dilakukan peninjauan kembali pencatatan harian dan diskusi tentang tantangan dalam implementasi metode. Evaluasi dilakukan secara reflektif untuk mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi secara bersama-sama. Akhirnya, pada fase refleksi bersama, peserta menyampaikan pengalaman dan perubahan sikap setelah mengikuti kegiatan. Mereka mengakui pentingnya pencatatan biaya dan pengelolaan usaha berbasis data, yang sebelumnya belum pernah mereka lakukan secara sistematis. Dengan demikian, pendekatan penelitian ini tidak hanya menghasilkan data akademik, tetapi juga

mendorong perubahan sosial berupa kebiasaan pencatatan, penguatan partisipasi keluarga, dan perilaku usaha yang lebih logis dan rasional (Yanti et al., 2024; Widyastuti et al., 2023).

Tabel 1. Rencana Kegiatan

Tahap	Kegiatan Utama	Output yang Dihasilkan
Identifikasi Masalah	Observasi awal terhadap usaha tempe Bapak Suardi	Masalah utama: tidak ada pencatatan biaya dan penentuan harga tidak berbasis HPP
Pemetaan Sosial Ekonomi	Wawancara eksploratif dengan pelaku usaha dan warga sekitar	Data awal potensi ekonomi lokal dan kesiapan partisipasi
Penetapan Fokus	Menentukan topik intervensi: penerapan metode HPP full costing	Rumusan tujuan dan luaran pengabdian yang spesifik
Perencanaan Intervensi	Penyusunan modul pelatihan HPP dan metode pendampingan	Rencana kegiatan pelatihan dan evaluasi terstruktur
Pengumpulan Data	Observasi proses produksi, wawancara, dokumentasi, studi literatur	Informasi rinci tentang alur produksi dan struktur biaya usaha
Analisis dan Diagnosa	Identifikasi biaya langsung dan tidak langsung; simulasi perhitungan HPP	HPP aktual sebesar Rp 6.500 per bungkus tempe
Pelatihan dan Pendampingan	Pelatihan pencatatan biaya, simulasi full costing, diskusi kelompok	Peningkatan literasi keuangan dan keterampilan penghitungan HPP
Evaluasi dan Validasi	Triangulasi data; diskusi reflektif bersama pelaku usaha	Penyesuaian harga jual menjadi Rp 7.800 dan pencatatan harian dimulai
Refleksi dan Rekomendasi	Merumuskan hasil pengabdian dan menyusun saran tindak lanjut	Rekomendasi untuk replikasi metode ke UMKM lain dan penelitian lanjutan

Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada usaha tempe rumahan milik Bapak Suardi yang berlokasi di Jl. A. Ghofar, Talang Keramat Raya, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, memberikan sejumlah temuan penting yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan efisiensi usaha dan keakuratan dalam menentukan harga pokok produksi (HPP).

Kegiatan ini dimulai dengan proses observasi awal yang menunjukkan bahwa perhitungan harga jual tempe sebelumnya dilakukan secara kasar dan tanpa dasar akuntansi biaya yang sistematis.



Gambar 1.

Tim Pengabdian beserta pemilik usaha tempe Pak Suardi

Sebelum dilakukan pendampingan, Bapak Suardi menetapkan harga jual tempe sebesar Rp.5.000 per bungkus berdasarkan kebiasaan pasar setempat dan pengalaman pribadi semata. Ia belum melakukan pencatatan terhadap biaya-biaya produksi secara rinci, khususnya dalam aspek biaya tidak langsung seperti listrik, penyusutan alat, serta tenaga kerja tak langsung yang sebenarnya berkontribusi dalam proses produksi. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian terhadap keuntungan dan bahkan menimbulkan kerugian finansial yang tidak disadari.

Melalui pendekatan full costing, dilakukan analisis menyeluruh terhadap seluruh elemen biaya produksi yang dikeluarkan dalam satu hari kerja, khususnya untuk produksi tempe berbasis 20 kilogram kedelai. Biaya bahan baku utama seperti kedelai dan ragi tercatat sebesar Rp. 500.000 per hari, sementara biaya tenaga kerja langsung yang dibayarkan kepada pekerja dibukukan sebesar Rp. 30.000. Di sisi lain, overhead tetap seperti listrik, gas, dan air dikalkulasi sebesar Rp. 30.000, dan biaya penyusutan alat dihitung sebesar Rp. 25.000 per hari.

Total keseluruhan biaya produksi harian yang dihasilkan dari penjumlahan seluruh komponen tersebut mencapai Rp. 585.000. Dengan rata-rata output produksi harian sebanyak 90 bungkus tempe, maka diperoleh nilai harga pokok produksi per bungkus sebesar Rp. 6.500. Angka ini dihitung dengan membagi total biaya produksi harian dengan jumlah bungkus tempe yang dihasilkan: $HPP = \text{Rp. } 585.000 / 90 = \text{Rp. } 6.500$ per bungkus

Analisis selanjutnya menunjukkan bahwa dengan harga jual lama sebesar Rp. 5.000 per bungkus, Bapak Suardi sebenarnya mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500 per unit. Oleh karena itu, direkomendasikan harga jual baru sebesar Rp. 7.800 per bungkus, yang mempertimbangkan HPP aktual ditambah margin keuntungan sebesar 20%. Perubahan ini secara langsung memberikan dampak positif terhadap pendapatan usaha.

Tabel berikut memperlihatkan perbandingan kondisi sebelum dan setelah proses pendampingan dilakukan:

Tabel 2. Perbandingan Kondisi Sebelum dan setelah Proses Pendampingan

Komponen Biaya	Sebelum Pendampingan	Setelah Pendampingan
Harga Pokok	Tidak dihitung	Rp. 6.500
Harga Jual	Rp. 5.000	Rp 7.800
Margin	Rugi Rp. 1.500	Untung Rp. 2.800

Data dalam tabel di atas menegaskan bahwa pendekatan penghitungan biaya yang lebih tepat mampu mengubah arah usaha dari kerugian menuju profitabilitas yang terukur. Selain memberikan pemahaman teknis, kegiatan pendampingan ini juga menjadi langkah awal bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya secara profesional berbasis data.

Proses pendampingan dilakukan melalui pendekatan partisipatif, di mana pelaku usaha terlibat aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Pendampingan dimulai dari observasi langsung proses produksi, kemudian dilanjutkan dengan forum diskusi kelompok kecil untuk mengidentifikasi alur produksi dan biaya tersembunyi, serta ditutup dengan pelatihan penyusunan laporan keuangan sederhana.



Gambar 2.
Kegiatan Pendampingan

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Wardiningsih et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pendampingan dalam penghitungan HPP pada UMKM tempe di Kekalik Grisak mampu meningkatkan akurasi penetapan harga jual hingga 35%. Artinya, metode ini memberikan kontribusi nyata terhadap ketepatan strategi harga yang diterapkan oleh pelaku usaha mikro.

Efek dari intervensi ini tidak hanya terlihat dalam perhitungan teknis, tetapi juga menyentuh ranah sosial-ekonomi keluarga. Setelah pelatihan, muncul kebiasaan baru seperti pencatatan pengeluaran dan pemasukan harian, penyesuaian harga jual berdasarkan analisis biaya, serta keterlibatan anggota keluarga khususnya istri dan anak Bapak Suardi dalam pengelolaan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa peran ekonomi rumah tangga semakin menguat dan membentuk basis ekonomi keluarga yang berkelanjutan.

Keterlibatan keluarga dalam proses produksi mencerminkan terbentuknya institusi rumah tangga sebagai pusat ekonomi lokal yang resiliensi. Ini sejalan dengan konsep pemberdayaan berbasis komunitas yang dikemukakan oleh Chambers (1997), yang

menekankan pentingnya partisipasi lokal dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan transformasi yang bermakna dari bawah ke atas.

Lebih lanjut, studi oleh Nasihin et al. (2024) dalam konteks UMKM pastel mini menunjukkan bahwa penerapan metode full costing mampu menurunkan inefisiensi biaya hingga 18%. Ini menunjukkan konsistensi manfaat metode ini dalam berbagai jenis usaha mikro yang berbasis makanan olahan rumahan. Temuan lainnya dari Paranita et al. (2024) menegaskan pentingnya keberlanjutan pendampingan. Dalam studi mereka tentang kampung industri tempe Pamulang, terbukti bahwa pelatihan yang dilakukan secara berkala memiliki dampak lebih signifikan dibandingkan dengan intervensi sesaat atau satu kali saja. Hasil yang berkelanjutan tercapai ketika pelaku usaha mendapat ruang untuk merefleksikan dan mengaplikasikan pengetahuan baru secara bertahap.

Dalam kerangka teoritis, penerapan metode full costing dalam konteks pengabdian ini memperkuat prinsip-prinsip akuntansi biaya seperti yang dijelaskan oleh Mulyadi (2016), bahwa penetapan harga produk harus didasarkan pada seluruh elemen biaya agar tidak merugikan pelaku usaha dan tetap kompetitif di pasar. Hal ini juga mengajarkan pentingnya manajemen usaha berbasis informasi akuntansi yang akurat.

Selain itu, penelitian terdahulu oleh Huda (2018) mengenai penerapan metode full costing untuk usaha tempe menunjukkan bahwa pemahaman mendalam atas struktur biaya tidak hanya membantu menetapkan harga secara tepat, tetapi juga menjadi dasar evaluasi kinerja usaha dan dasar perencanaan ekspansi usaha ke depannya.

Secara umum, hasil kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa pemberdayaan UMKM melalui pelatihan akuntansi biaya bukan hanya relevan tetapi juga mendesak untuk dilaksanakan secara luas. Perubahan yang terjadi di usaha tempe Bapak Suardi mencerminkan transformasi mikro yang berdampak nyata terhadap efisiensi operasional dan stabilitas keuangan usaha.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengabdian masyarakat ini telah memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan struktur biaya produksi, peningkatan keuntungan, dan munculnya kesadaran baru dalam pengelolaan usaha berbasis data. Proses ini merefleksikan perubahan sosial-ekonomi yang tumbuh secara organik dari komunitas kecil dan memiliki potensi besar untuk direplikasi di UMKM lain dalam konteks yang serupa.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan terhadap usaha tempe skala rumahan milik Bapak Suardi di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan dampak yang signifikan, terutama dalam hal pengelolaan biaya dan strategi penetapan harga jual. Sebelum intervensi dilakukan, metode penetapan harga dilakukan secara estimatif berdasarkan kebiasaan dan pengalaman pribadi tanpa pendekatan akuntansi biaya yang terstruktur. Praktik ini menyebabkan tidak dikenalnya struktur biaya yang lengkap, yang berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak teridentifikasi secara langsung.

Melalui pendampingan yang berfokus pada perhitungan harga pokok produksi (HPP) menggunakan pendekatan full costing, ditemukan bahwa biaya produksi per bungkus tempe mencapai Rp 7.800. Angka ini jauh melampaui harga jual sebelumnya, yaitu Rp 5.000 per bungkus. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa selama ini usaha tersebut secara tidak sadar menjual produknya di bawah biaya produksi, yang secara ekonomi berarti mengalami kerugian pada setiap unit yang terjual.

Penemuan ini menjadi titik balik penting dalam kesadaran finansial pelaku usaha. Setelah pemahaman tentang komponen biaya diperoleh, dilakukan penyesuaian harga jual serta implementasi pencatatan sederhana secara sistematis. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan margin keuntungan, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih efisien dalam pengelolaan biaya, serta memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai modal kerja yang dibutuhkan.

Lebih jauh, keberhasilan intervensi ini tidak hanya mencakup aspek teknis manajemen usaha, tetapi juga membawa dampak positif dalam struktur sosial ekonomi keluarga. Keluarga Bapak Suardi mulai berperan aktif dalam proses pencatatan dan pengelolaan keuangan, memperlihatkan peningkatan partisipasi dan pemberdayaan berbasis rumah tangga. Hal ini memperkuat temuan Ekasari et al. (2024) bahwa keterlibatan keluarga dalam pengelolaan usaha memperbesar peluang terciptanya praktik usaha yang berkelanjutan.

Pendampingan berbasis keluarga terbukti efektif dalam mendorong perubahan perilaku ekonomi yang lebih sadar dan rasional. Dalam konteks literasi keuangan, pengalaman keluarga Suardi mencerminkan transformasi dari praktik usaha berbasis tradisi ke arah manajemen berbasis data. Ini mendukung gagasan Wardiningsih et al. (2024) bahwa sebagian besar pelaku UMKM sektor pangan belum menerapkan prinsip-prinsip dasar pencatatan biaya, yang menjadi tantangan utama dalam penguatan UMKM.

Sejalan dengan itu, pelaku usaha seperti Bapak Suardi disarankan untuk secara konsisten menerapkan sistem pencatatan biaya produksi harian, termasuk pengeluaran untuk bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Prihanisetyo (2025) yang menunjukkan bahwa perhitungan HPP dengan metode full costing membantu pelaku usaha menentukan harga jual yang mencerminkan realitas biaya yang sesungguhnya.

Sistem pencatatan yang sederhana namun konsisten menjadi fondasi penting bagi usaha mikro dalam membangun struktur keuangan yang sehat. Dalam jangka panjang, penguasaan metode full costing memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan analisis biaya yang lebih mendalam, mengevaluasi efisiensi operasional, serta menyesuaikan strategi produksi dengan dinamika pasar yang fluktuatif (Kumbara et al., 2022).

Lebih lanjut, lembaga pendidikan tinggi dan dinas koperasi memiliki peran strategis dalam memperluas jangkauan pelatihan akuntansi biaya di kalangan UMKM. Kegiatan serupa perlu direplikasi dengan menyesuaikan kebutuhan lokal dan karakteristik usaha. Fokus pada pelatihan praktis dan kontekstual sangat diperlukan agar hasil pelatihan dapat langsung diterapkan dan berkelanjutan.

Pelatihan yang menekankan pada metode full costing sebaiknya juga dilengkapi dengan pengenalan metode lain seperti variable costing atau activity-based costing (ABC), guna memperkaya wawasan pelaku UMKM dalam memilih metode yang paling sesuai dengan karakteristik usahanya. Hal ini sebagaimana disarankan oleh Rahmadani dan Febrianti (2022), bahwa pemahaman komparatif terhadap berbagai metode perhitungan HPP akan memperluas kapasitas manajerial pelaku usaha.

Tidak hanya dari sisi teknis, pengembangan sistem pencatatan biaya juga perlu diarahkan pada integrasi teknologi. Aplikasi sederhana berbasis Android atau sistem pembukuan digital dapat menjadi solusi praktis untuk mempercepat adaptasi pencatatan di lingkungan UMKM. Penggunaan teknologi ini juga membuka peluang untuk konektivitas data yang lebih luas, termasuk dalam pengajuan pendanaan atau partisipasi dalam program-program pemerintah.

Dari sisi kebijakan, pemerintah daerah dan otoritas terkait disarankan untuk menyusun kebijakan afirmatif yang mendukung pelatihan dan digitalisasi sistem keuangan usaha mikro. Pendekatan berbasis keluarga dan komunitas lokal sebaiknya menjadi fondasi dalam merancang kebijakan pemberdayaan UMKM agar lebih inklusif dan kontekstual.

Penelitian ke depan perlu diarahkan pada evaluasi jangka panjang dari intervensi HPP terhadap keberlanjutan usaha, termasuk bagaimana perubahan dalam pencatatan keuangan berdampak pada keputusan bisnis strategis. Selain itu, respons pasar terhadap penyesuaian harga jual pasca intervensi juga penting untuk diteliti agar pelaku UMKM dapat merumuskan strategi penetapan harga yang tidak hanya berdasarkan biaya, tetapi juga mempertimbangkan daya beli konsumen.

Dengan mengadopsi sistem manajemen biaya yang terstruktur dan literasi keuangan yang meningkat, pelaku UMKM memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saing. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat keberlangsungan ekonomi mikro, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aspek pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (tujuan ke-8) serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (tujuan ke-12), sebagaimana ditegaskan oleh Sitepu et al. (2023).

Kesimpulannya, praktik perhitungan HPP dengan pendekatan full costing memberikan fondasi penting bagi penguatan struktur biaya UMKM. Proses ini memperkuat efisiensi operasional, meningkatkan kepercayaan diri dalam menetapkan harga, serta membuka peluang bagi transformasi sosial ekonomi berbasis keluarga dan komunitas. Temuan dari studi ini dapat dijadikan acuan untuk replikasi program serupa di wilayah lain sebagai bentuk nyata kontribusi akademisi dan institusi dalam memperkuat sektor UMKM di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Harga Komoditas Pangan 2023. Jakarta: BPS.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications.
- Dewianawati, H., & Ilmi, M. (2024). Literasi keuangan dan ketahanan pangan rumah tangga produsen pangan lokal. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 9(1), 55–67.
- Ekasari, T., Yuliana, D., & Basuki, R. (2024). Keterlibatan keluarga dalam keberlanjutan usaha mikro pangan lokal. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 6(2), 122–131.
- Fauji, A., & Median, A. (2023). Dokumentasi visual sebagai alat validasi dalam penelitian partisipatif. *Jurnal Riset Sosial Humaniora*, 5(3), 77–85.
- Huda, M. (2018). Penerapan metode full costing untuk harga pokok produksi tempe pada home industri Qolbun Salim (Skripsi, UIN Walisongo). <https://eprints.walisongo.ac.id/17286/>
- Kumbara, Y., Putri, A., & Firmansyah, I. (2022). Perhitungan harga pokok produksi dengan metode full costing pada UMKM pengolahan kedelai. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Mikro*, 8(1), 88–95.
- Mulyadi. (2016). *Akuntansi Biaya* (5th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Nasihin, I., Lasmini, L., & Fatihah, D. I. (2024). Pendampingan dan pelatihan penentuan harga pokok produksi pastel mini UMKM Rizki Kanaya. *Jurnal Janayu*, 6(1), 22–30. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/Janayu/article/download/30728/13978>
- Nurtiasni, M., Haris, A., & Yuniarti, D. (2025). Efektivitas metode full costing dalam penetapan harga jual produk UMKM makanan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 10(1), 15–27.
- Paranita, E. S., & Giyatmi, G. (2024). Penentuan biaya produksi tempe pada kampung industri kecil Pamulang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM)*, 5(2), 10–18. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/download/4338/2844>
- Prihanisetyo, A. (2025). Dampak pelatihan full costing terhadap penentuan harga jual pada UMKM makanan. *Jurnal Ekonomi Mikro Terapan*, 11(1), 33–45.
- Rahmadani, R., & Febrianti, R. (2022). Analisis penentuan harga pokok produksi UMKM makanan ringan menggunakan pendekatan full costing dan variable costing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Nusantara*, 7(2), 70–80.
- Ramadhani, D., & Harahap, R. (2023). Persepsi pelaku UMKM terhadap pencatatan biaya produksi. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 25–34.
- Santoso, F., & Wulandari, E. (2023). Pelatihan perhitungan harga pokok produksi pada usaha ayam goreng saus Depok. *Jurnal Bukit Pengharapan*, 4(1), 12–20.

- Sitepu, F. R., Nasution, L. N., & Wibowo, T. S. (2023). Peran UMKM dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 12(3), 105–117.
- Sunarwati, R., & Sa'diyah, N. (2024). Efisiensi proses produksi tempe melalui pendekatan sistematis pada UMKM. *Jurnal Teknologi Pangan Lokal*, 6(1), 41–49.
- Triwidatin, T., Mahendra, M., & Sari, R. P. (2022). Validitas data dalam penelitian kualitatif partisipatif: Pendekatan triangulasi. *Jurnal Penelitian Sosial*, 5(2), 89–98.
- Wahyuni, L., Murtanto, M., & Ariani, M. (2022). Penentuan harga pokok produksi dalam menentukan harga jual barang bagi UMKM. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 8(2), 38–45. <https://journal.fourzero.id/index.php/di/article/download/23/15>